

# **UPAYA ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE DALAM MEMBANTU MENANGANI KRISIS UKRAINA 2013-2014**

Alkurni Haskelindos  
(haskelindos@gmail.com)  
Pembimbing : Pazli, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas  
Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*This Paper will explain about how Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to help resolving Ukraine Crisis. OSCE as the biggest security organization in Europe has responsibility to help its participating states which have critical situation and domestic issues. In last November 2013, Ukraine Crisis has been begun after Yanukovich, the Ukraine President, rejected cooperation agreement with Europe Union (EU). After rejection of the agreement, demonstration from Ukraine mass was happened to protest the president policy at Ukraine Independent Square. This demonstration is called "Maidan", and day by day, demonstration became more intense. This protest also has impact to neighbor countries, like Russia. Russia action to respon this situation with military intervention to protect some people in east Ukraine who use Russia Language, this community indentified its self as Russian. Because of that, this crisis more likely ethnical conflict between Ukranian and Russian. This research used qualitative research method, with description analysis methods. Data collection techniques used are library research technique. Based on the data obtained by the researches that OSCE missions are peace movement, socializing democratic values, and open dialogue both for Ukraine government with Russia federation, and Ukraine government with its civilian. OSCE actions toward Ukraine Crissis are reporting specific situation on Ukriane to each participating states, observing president and parliamentary election, observing minority rights in east Ukraine, and open dialogue between related actors.*

**Keywords:** *OSCE, Ukraine Crissis, Russia Intervention, OSCE actions, Ethnical Conflic*

## **Pendahuluan**

Pada penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai upaya-upaya *Organization for Security and Co-operation in Europe* dalam membantu menangani krisis Ukraina. Krisis yang terjadi di Ukraina tidak hanya melibatkan permasalahan politik saja, tetapi juga masalah sosial dengan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap warga sipil, maka *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam hal ini yang bertindak sebagai organisasi

keamanan terbesar untuk Eropa merasa bertanggung jawab dalam penyelesaian krisis yang terjadi tersebut. Ukraina adalah negara bekas pecahan dari Uni Soviet dan sampai sekarang memiliki hubungan yang masih sangat dekat dengan Rusia yang juga bekas dari Uni Soviet dulu. Faktor ini juga menjadi pemicu banyaknya warga negara Ukraina yang menginginkan agar Ukraina bisa bergabung dengan Rusia.

Ukraina sebelum krisis adalah negara yang cukup memprihatinkan.

Sejak tahun 1991, Ukraina masih belum bisa melepaskan diri dari krisis yang terjadi. Bahkan dalam beberapa kondisi, Ukraina lebih memprihatinkan lagi dari pada itu. Kondisi itu tidak hanya bergantung pada aktor-aktor yang ada dalam politik Ukraina, tetapi juga pemerintahan yang masih menggunakan sistem birokrasi Rusia. Pemerintahan yang ada masih belum bisa memperhatikan kepentingan masyarakat, mereka lebih mendahulukan kepentingan individu, dan hukum digunakan untuk mencapai kepentingan itu, dan mematikan pergerakan oposisi.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2010 sampai awal tahun 2014, kurang lebih empat tahun presiden Viktor Yanukovych berkuasa, dia telah merubah Ukraina menjadi tidak demokratis, perekonomian yang anjlok, dan keamanan yang lemah. Kombinasi dari ketiga faktor ini secara umum menghasilkan kemerosotan negara dan secara khusus meningkatkan masuknya pengaruh dari luar dengan mudah.<sup>2</sup> Pada tahun 2013, Ukraina berada pada peringkat ke-117 dan termasuk kedalam indeks negara gagal dalam penilaian *Fund for Peace*.<sup>3</sup> Jika sebuah negara telah masuk ke dalam indeks negara gagal, maka negara tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melindungi dan memberikan kenyamanan bagi warga negaranya, karena fungsi sebuah negara adalah untuk

memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga negaranya.

Politik, ekonomi, dan sosial telah rusak, pincang, atau terpinggirkan karena mencoba melindungi elite tetapi menolak kepentingan masyarakat banyak. Keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*) sudah runtuh, dikuasai oleh individu atau beberapa kelompok saja. Setelah Revolusi *Orange*, kekuatan eksekutif sepenuhnya berada ditangan presiden, yang juga mempunyai kuasa penuh atas pemerintahan.<sup>4</sup> Hal ini semakin menjauhkan Ukraina dari nilai-nilai demokrasi dan menempatkan Ukraina sebagai negara yang tidak demokratis. *Global Democracy Ranking* menempatkan Ukraina pada posisi ke-63 pada tahun 2011-2012, turun sepuluh peringkat dari pada tahun 2008-2009.<sup>5</sup>

Perekonomian negara ini hancur karena krisis keuangan global, menurunkan pertumbuhan GDP yang pada tahun 2009 berada pada 14,8 % menjadi 4,2 % pada tahun 2010 dan 5,2 % pada tahun 2011. Kehancuran ekonomi Ukraina tidak hanya karena krisis keuangan global, tetapi juga karena tingginya angka korupsi yang terjadi. Negara-negara Eropa lainnya bermaksud untuk menolong Ukraina lepas dari kondisi domestik yang tengah terjadi tersebut, dan meminta Ukraina untuk bisa bekerja sama dengan Uni Eropa serta bisa tergabung ke dalam Uni Eropa pada 2013 silam.

---

<sup>1</sup> Steffen Halling & Susan Stewart. 2014. Ukraine in Crisis: Challenge of Developing a New Political Culture. Dalam *German Institute for International and Security Affairs*. Hal. 1-2

<sup>2</sup> Mykola Kapitonenko. 2014. Ukraine: The Political Crisis, Dalam *Europe Policy Paper 3 : Regional Repercussions of The Ukraine Crisis*. Hal. 34

<sup>3</sup> "The Failed States Index 2013," dapat dilihat dalam <http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable> diakses 22 November 2014

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> "The World Bank GDP Growth Annual," dapat dilihat dalam <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG> diakses 22 November 2014

Krisis di Ukraina mulai terjadi sejak November 2013 ketika Pemerintah Ukraina yang dipimpin oleh Viktor Yanukovych memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, termasuk perjanjian *Free Trade Area*. Karena keputusan ini terjadilah demonstrasi di Kiev oleh warga negara yang pro-barat. Pada tanggal 21 Februari 2014 dilakukan kompromi yang di mediasi oleh tiga negara, yaitu Jerman, Perancis, dan menteri luar negeri Polandia yang membicarakan tata cara untuk pemilihan pada Desember 2014. Walaupun begitu, pada hari berikutnya suhu dari krisis yang terjadi mulai membesar, dan berakhirnya dengan menghilangnya Viktor Yanukovych. Dengan menghilangnya Viktor Yanukovych ini, para demonstran berhasil menduduki gedung utama di Kiev. Parlemen Ukraina menurunkan Yanukovych dari kedudukannya dan segera membentuk pemerintahan yang baru.<sup>6</sup>

Sejak keputusan yang dibuat oleh Yanukovych ini, terjadi kemudian demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Ukraina yang kebanyakan berada di kawasan barat. Mereka melakukan protes di Lapangan Kemerdekaan Ukraina dan peristiwa ini dikenal dengan sebutan "Maidan". Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menderita karena kemiskinan dan perilaku korupsi pihak pemerintah, termasuk keluarga Yanukovych.

Krisis yang terjadi bertambah parah ketika pemerintahan baru Ukraina belum bisa untuk menenangkan massa

---

<sup>6</sup>Ben Smith & Daniel Harari. 2014. *Ukraine, Crime, Russia*. Research Paper : House of Common Library. Hal 1

yang semakin hari semakin banyak terjadi kekerasan. Krisis menjadi semakin besar ketika pada 1 Maret 2014, atas permintaan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, parlemen Rusia (Duma) memutuskan untuk mengirimkan tentaranya memasuki Ukraina dengan tujuan mengambil kendali dari militer Ukraina yang bertempat di Krimea, termasuk Belbek, Balaclava dan Kerch. Sebagai respon, pemerintah Ukraina menyiapkan tentaranya dengan kewaspadaan tinggi, dan dilaporkan juga bahwa demonstran pro-Rusia dalam jumlah besar telah memasuki Karkhiv di Ukraina Timur, kota kedua terbesar.<sup>7</sup>

## **Pembahasan**

### **Etnik Masyarakat Ukraina**

Krisis Ukraina diduga kuat juga akibat dari perseteruan antara pemerintah yang sebelumnya berkuasa, Viktor Yanukovych, merupakan presiden pro-Rusia, dengan pihak oposisi yang pro-barat. Perbedaan bahasa dan etnis di Ukraina memang terjadi. Orang-orang pro-Rusia banyak bermukim di Donets'k dan Luhans'k, pusat industri Ukraina dan sangat vital bagi perekonomian Ukraina. Rusia juga telah menyatakan bahwa keberadaan Uni Eropa (selanjutnya disingkat UE) dan pelebaran sayap NATO ke wilayah Ukraina merupakan ancaman langsung bagi kepentingan strategis Rusia di Ukraina.

Kawasan Krimea, semenanjung Pantai Laut Hitam Ukraina, merupakan wilayah penting bagi Ukraina dan Rusia. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Krimea sebanyak kurang lebih 2,3 juta jiwa, merupakan etnis yang berbahasa

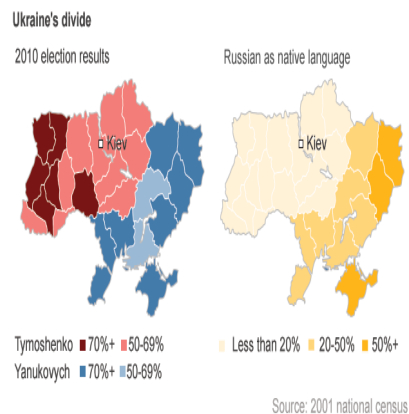
---

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 4

Rusia, sebagai warisan budaya Rusia selama kurang lebih 200 tahun di kawasan ini.<sup>8</sup> Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa sejak abad ke-18 Ukraina berada dalam pengaruh kekaisaran Rusia. Jika mayoritas masyarakat Krimea adalah etnis Rusia dan berbahasa Rusia, maka akan sangat kuat pengaruh Rusia dan masyarakat Krimea akan lebih mendekatkan diri pada Federasi Rusia. Negara ini telah dipengaruhi oleh dua kekuatan, Rusia dan Uni Eropa, sejak keruntuhan Soviet tahun 1991 dan hal ini direfleksikan dalam perbedaan bahasa dan budaya.

Bahasa Rusia digunakan sebagai bahasa utama di sebagian besar wilayah timur dan selatan, termasuk Krimea. Sedangkan di Ukraina Barat, sebagian besar masyarakatnya menggunakan bahasa Ukraina dan banyak teridentifikasi sama dengan masyarakat Eropa Tengah. Hal ini, juga mempengaruhi pola pemilihan yang terjadi di Ukraina. Pada tahun 2004 dan 2010, komposisi suara yang ada juga terbagi. Sebagian besar wilayah yang berbahasa Rusia memberikan suara untuk Viktor Yanukovych dan sebagian lagi memberikan suara pada Yulia Tymoshenko di tahun 2010 silam.

### **Gambar 2 Pembagian Ukraina Berdasarkan Suara Pemilih dan Wilayah Berbahasa Rusia**



*Sumber: Sensus Nasional 2001 dari BBC News 2014*

Jadi, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Ukraina memiliki etnis dan masyarakat yang berbeda. Dua mayoritas etnis berbahasa Ukraina di wilayah barat dan berbahasa Rusia di wilayah timur di Ukraina. Sehingga, dengan komposisi etnis yang ada ini, jika dengan sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan konflik yang lebih besar.

### **Kondisi Ukraina Sebelum Krisis**

Selain permasalahan etnis yang ada di Ukraina, terdapat juga permasalahan lain yang juga memberikan efek yang sangat signifikan bagi perkembangan domestik Ukraina. Setelah meredeka atau berakhirnya Perang Dingin, Ukraina juga tidak terlepas dari permasalahan ekonomi yang buruk. Kegagalan ekonomi merupakan refleksi dari ketidakstabilan politik yang terjadi. Permasalahan ekonomi yang buruk di Ukraina sudah terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin. Kebijakan ekonomi yang licik, ketidakpercayaan pada reformasi ekonomi, dan permasalahan korupsi telah menghancurkan negara ini.

Pada saat awal tahun 1990an, ketika berakhirnya Perang Dingin,

<sup>8</sup> Bbc News. 2014. *Ukraine's Sharp Divisions*. Dapat dilihat dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-26387353> diakses 14 Desember 2014

Ukraina merupakan negara yang perekonomiannya sangat tidak produktif. Seperti halnya dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang lainnya, Ukraina merupakan negara yang menderita karena inflasi yang sangat tinggi, bahkan Ukraina lah yang paling parah kemerosotan ekonominya. Hiperinflasi yang terjadi pada tahun 1990an merupakan hasil dari ketidakmampuan Ukraina bersaing dalam ekonomi global dan tingginya angka pengeluaran pemerintah membuat kemerosotan hasil produksi. Dalam merespon hal ini, bank pusat Ukraina mengganti mata uang yang lama (Karbovanets) dengan mata uang baru (Hryvnia) yang diharapkan mampu stabil dengan Dollar. Tetapi, mata uang yang baru masih menghadapi goncangan-goncangan di akhir tahun 1990an, dikarenakan juga krisis yang melanda Rusia pada tahun 1998.<sup>9</sup>

Pada awal kemerdekaan sampai pada tahun 2000, pemerintahan di Ukraina didominasi oleh sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh Soviet. Kelompok elite yang ada dalam pemerintahan Ukraina banyak sebelumnya pada masa Soviet menjadi orang-orang penting dalam pemerintahan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa daerah Ukraina Timur, kawasan Donbas merupakan pusat industrialisasi dan pengembangan ekonomi pada masa Soviet. Setelah merdeka, kawasan ini tetap menjadi daerah pusat pengembangan

perekonomian di Ukraina Timur. Sistem oligarki yang terjadi dalam pemerintahan Ukraina saat itu, membuat kelompok elite atau Kelompok Ekonomi-Politik (PEGs) yang ada di Ukraina mendapat dua akses yaitu ekonomi (keuangan dan industrial), dan politik (termasuk media) yang meningkatkan keuntungan mereka. Kelompok elite yang ada di Ukraina bahkan sampai mempengaruhi perekonomian ke tingkat yang lebih rendah seperti firma. Aturan-aturan politik dibuat bukan untuk menarik investor asing tapi untuk memfasilitasi konglomerat lokal.

### **Intervensi Militer Rusia**

Setelah penurunan Yanukovych dan pembentukan pemerintahan baru Ukraina, kondisi di Ukraina bertambah parah. Situasi di kawasan timur menjadi bergejolak dan menimbulkan suatu dilema tersendiri bagi Rusia. Dari perspektif Rusia, Ukraina selama kurang lebih dua dekade merupakan negara lemak, mudah terpecah, dan sering tidak dapat dipercaya mengingat Ukraina merupakan transit produk energi Rusia Gazprom menuju Eropa. Sekarang, Ukraina telah jatuh ke pihak barat dan dipimpin oleh koalisi pro-barat di Kiev dan kelompok nasionalis anti-Rusia. Dalam pandangan Kremlin, situasi ini menciptakan bahaya ganda bagi penggunaan bahasa, budaya, dan identitas Rusia dalam Ukraina dan dari bergabungnya Ukraina masuk kedalam NATO. Dua kondisi ini menciptakan suatu beban tersendiri bagi Vladimir Putin dalam mengambil kebijakan pada Ukraina. Kebijakan Putin akan bersikap lunak atau keras dengan melakukan intervensi militer.

<sup>9</sup> The Economist. *Ukraine and Russia: Why is Ukraine's Economy in Such a Mess ?*. 2014. Dapat dilihat dalam <http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/03/ukraine-and-russia> diakses 22 November 2014

Kebijakan Rusia sebelum terjadinya krisis ini, hanyalah sebatas kebijakan yang ringan dan berfokus pada interaksi *top-level* dengan presiden Ukraina, tiba-tiba saja berubah menjadi keras. Tujuan utama adalah untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, dan idealnya untuk kembali membawa Ukraina kedalam proyek integrasi Eurasia. Ada dua tujuan yang ingin dicapai Rusia. *Pertama*, dengan membuat Krimea jauh dari otoritas pemerintahan baru Kiev sesudah Yanukovych. Hal ini dilakukan dengan mengisolasi kawasan semenanjung dari daratan Ukraina, netralisasi pasukan Ukraina yang ada di Krimea, dan menolong orang-orang pro-Rusia di Krimea dalam mengambil alih pemerintahan lokal, parlemen, lembaga-lembaga penegakan hukum.<sup>10</sup>

Tujuan kedua Moscow adalah untuk menciptakan suatu kawasan federal baru di Ukraina, yang akan menghalangi dominasi negara oleh Kiev dan Ukraina barat, dan menggagalkan pengaruh NATO disana.<sup>11</sup> Pada 1 Maret 2014, Putin mendapatkan persetujuan dari Dewan Federasi, lembaga tertinggi dari Parlemen Rusia, untuk menggunakan kekuatan militer Rusia masuk ke Ukraina. Kebijakan intervensi Rusia dan krisis Ukraina ini juga sangat mempengaruhi negara-negara kawasan Eropa Timur. Moldova, Georgia, dan Belarus yang sebelumnya sangat dekat dengan Rusia dan menolak untuk melakukan perjanjian dengan UE, kini semakin mendekatkan diri dengan UE. Tindakan Rusia ini tentu saja akan menimbulkan suatu tantangan

baru bagi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.

### **Referendum Krimea, dan Separatisasi Luhans'k dan Donets'k**

Setelah Majelis Duma Rusia menyetujui permintaan Putin untuk melakukan intervensi militer kedalam wilayah Krimea pada 1 Maret 2014, Rusia pun mengirimkan tentaranya menuju Krimea untuk mengambil alih Krimea dan mengamankan masyarakat pro-Rusia yang ada di Krimea. Rusia juga mendukung diadakannya referendum di Krimea untuk menentukan nasib masyarakat Ukraina yang ada di Krimea. Krimea adalah kawasan dengan status sebagai sebuah republik otonomi khusus, walaupun Ukraina bukanlah negara dengan sistem federal. Krimea mempunyai populasi kurang lebih 2 juta penduduk dengan persentasi 60 persen mengakui diri mereka sebagai etnik Rusia, 24 persen mengaku sebagai etnik Ukraina, dan 12 persen adalah etnik Tatar.<sup>12</sup>

Langkah awal yang dilakukan untuk mempersiapkan referendum Krimea adalah pengambilan suara yang dilakukan oleh perwakilan dari parlemen Krimea yang diadakan pada tanggal 27 Februari membicarakan mengenai referendum Krimea dalam hal memperbesar otonomi Krimea.<sup>13</sup> Kemudian, sebuah deklarasi kemerdekaan yang dilakukan pada 11 Maret dan referendum yang akan diadakan pada 16

---

<sup>10</sup> Trenin. *Op.cit.* hal. 6

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 7

---

<sup>12</sup> Perhitungan berdasarkan sensus nasional tahun 2001

<sup>13</sup> Roy Allison. 2014. *Russian 'Deniable' Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke The Rule.* Dalam *Jurnal International Affairs* 90:6, 2014. Hal. 1260



Maret 2014. Putin melihat hal ini sebagai sebuah ekspresi dari rakyat Krimea untuk melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina. Ia menyatakan bahwa ia akan menghormati keputusan dari rakyat Krimea ini. Dua hari sesudah referendum, dimana hasil referendum menyatakan bahwa 90 persen rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia, Putin menandatangani penyatuan Krimea dan kota Sevastopol sebagai bagian dari Federasi Rusia dan esok harinya mulai diberlakukan hukum dengan konstitusi Rusia.<sup>14</sup>

Pada awal bulan Mei, kelompok militan di kawasan Luhans'k dan Donets'k mengadakan referendum juga dan memproklamasikan kemerdekaan 'republik' mereka dari pemerintahan Kiev. Moscow secara terang-terangan menunjukkan simpati dan dukungannya terhadap para pemberontak tetapi Moscow tertahan antara dua pilihan, apakah akan mengakui kemerdekaan mereka atau mengirim tentara sebagai perlindungan untuk mereka.<sup>15</sup> Dalam mengatasi kelompok pemberontak ini, pemerintah pusat meluncurkan sebuah "operasi anti terorisme" di kawasan Luhans'k dan Donets'k, yang membuat banyak korban berjatuhan dari kedua pihak, dan mendengarkan slogan krisis kemanusiaan. Disisi lain, Rusia memberikan bantuan kepada militan berupa semangat moral, bantuan politik, dan bantuan dukungan materil.<sup>16</sup>

### **Upaya-upaya OSCE Dalam Membantu Menangani Krisis Ukraina**

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Trenin. *Op.cit.* hal. 7

<sup>16</sup> *Ibid*

### **OSCE Melaporkan Setiap Hari Peristiwa dan Perubahan Krisis di Ukraina**

Tugas ini dimaksudkan agar negara-negara anggota mengetahui segala perubahan dan perkembangan yang terjadi di Ukraina. Pada tanggal 21 Maret, OSCE menurunkan sebanyak 220 pemantau ke Ukraina untuk mengawasi dan melaporkan peristiwa penting yang terjadi. Laporan yang diberikan oleh pemantau OSCE ini dapat mempengaruhi politik luar negeri negara-negara anggota dalam hubungannya dengan Ukraina ataupun dengan Rusia.

OSCE SMM mencatat peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi seperti kondisi kawasan timur, terutama Luhans'k dan Donets'k yang telah mengproklamirkan diri menjadi "Donets'k People's Republic" dan "Luhans'k People's Republic". OSCE SMM melaporkan kondisi keamanan yang terjadi, perubahan arah perang, korban jiwa (misalnya terbunuhnya anggota ICRC),<sup>17</sup> persenjataan, dan semua hal yang berhubungan dengan krisis yang terjadi.

### **OSCE Mengadakan Pertemuan Di Genewa dan Deklarasi Genewa**

Negara-negara Eropa, Rusia, dan Ukraina berusaha untuk mencari solusi dan cara yang tepat dalam mengurangi ketegangan yang terjadi di Ukraina. Uni Eropa, AS, Rusia, dan Ukraina sepakat untuk mengadakan pertemuan di Genewa pada tanggal 17 April 2014. Pertemuan tingkat tinggi itu dihadiri Wakil Senior

---

<sup>17</sup> OSCE. Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2 October 2014.

Uni Eropa Urusan Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Catherine Ashton, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Penjabat Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchysya.

Pertemuan pertama sejak krisis Ukraina meletus tersebut dilakukan untuk memulai dialog guna mencari cara menangani perkembangan krisis yang meningkat di Ukraina. OSCE bertindak sebagai katalis untuk melaksanakan dialog politik bagi negara-negara yang terlibat dalam krisis ini. Dalam pertemuan empat pihak ini terdapat tiga poin yang cukup jelas yang disebut dengan *Geneva Talks*, diantaranya:

1. Semua pihak terlibat harus menahan diri agar tidak melakukan tindak kekerasan dan perilaku intimidasi
2. Semua kelompok bersenjata tidak sah harus dilucuti, dan semua gedung yang diduduki harus dikembalikan kepada pemiliknya
3. Pengampunan akan diberikan kepada para yang menyerahkan diri dan senjatanya kecuali bagi mereka yang dinyatakan bersalah karena kejahatan berat<sup>18</sup>

Pertemuan lanjutan dari *Geneva Talks* adalah Deklarasi Jenewa yang diadakan pada 17 Mei 2014. Kerangka dari deklarasi ini adalah persiapan aturan dalam pemilihan presiden pada 25 Mei mendatang. Kerangka tersebut terdapat empat hal yang disebutkan, yaitu:

1. Non-kekerasan (*non-violence*). Pihak-pihak terlibat harus menahan diri dari segala bentuk tindak kekerasan atau provokasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Jenewa ini harus sepenuhnya mendukung kerangka ini. Para pemantau (pengamat) OSCE harus bisa melaksanakan kerangka ini dalam bentuk nyata dan segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi akan dilakukan penyelidikan dan pemberian hukuman.
2. Bebas senjata (*disarmament*). Para tim pemantau militer (angkatan bersenjata) OSCE harus mempunyai kapabilitas dalam mencari fakta-fakta terkait dengan krisis.
3. Dialog nasional. Dialog nasional ini tergantung kepada pemerintahan Ukraina dalam menentukan jenis dialog yang akan mereka lakukan. OSCE telah memiliki Wolfgang Ishinger sebagai ketua koordinator dan Kiev juga seharusnya menentukan siapa yang akan menjadi ketua koordinator mereka.
4. Pemilihan presiden pada 25 Mei 2014 dan diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan ini, serta pemantau dari OSCE/ODIHR juga akan terlibat dalam proses tersebut.<sup>19</sup>

### **OSCE/ODIHR Dalam Mengawasi Pemilihan Presiden dan Parlemen di Ukraina**

Perkembangan selanjutnya dari kinerja OSCE dalam menjalankan

---

<sup>18</sup> Marc Perrin de Brichambaut. OSCE & The Crisis in Ukraine. Dalam *Japan Institute of International Affairs, Tokyo 21 Mei 2014*. Hal. 3

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 4



misinya di Ukraina adalah OSCE/ODIHR (*Office for Democratic Institutions and Human Rights*) berperan sebagai pengawas (peninjau) dalam pemilihan presiden dan parlemenn di Ukraina. Dalam menerapkan dan menjalankan nilai-nilai demokrasi, salah satunya ialah sistem pemilihan yang demokratis dan persamaan kedudukan masyarakat sebagai pemilih. Tim yang akan diberangkatkan ke Ukraina dipimpin oleh Tana de Zulueta (Italia) dengan 18 tim inti ahli dari 12 negara anggota yang ada di Kiev, 100 pengamat jangka pendek (*long term observer*) diturunkan ke kawasan-kawasan, dan 900 pengamat jangka pendek (*short term observer*) yang di datangkan dari negara-negara anggota lainnya.<sup>20</sup>

Pada 28 Februari 2014, menteri luar negeri Ukraina mengundang OSCE/ODIHR untuk meninjau pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada 25 Mei. Dalam memenuhi mandat tersebut untuk meninjau pemilihan, OSCE/ODIHR menurunkan sebuah misi yaitu Misi Pengawasan Pemilihan (*Election Observation Mission/EOM*). Sebelumnya, OSCE/ODIHR juga telah pernah mengawasi pemilihan parlemen di Ukraina tahun 2012 dan pemilihan presiden tahun 2010. ODIHR bersama Komisi Venice Dewan Eropa juga mencanangkan beberapa bentuk kerjasama dalam membuat konsep perundang-undangan pemilihan.

Pemilihan parlementer di Ukraina dikelola oleh sistem 3 tingkat komisi

pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Pusat (*Central Election Commissions/CEC*), 213 Komisi Pemilihan Kawasan (*District Election Commissions/DEC*), dan 29.977 Komisi Pemilihan Daerah (*Precinct Election Commission/PEC*). CEC merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada masalah-masalah administrasi dalam pemilihan yang bertindak secara bebas, profesional, dan kolektif. Permasalahannya adalah menurunnya transparansi dari CEC ini ketika mereka melakukan pertemuan dalam mempersiapkan pemilihan karena pertemuan diadakan secara tertutup.<sup>21</sup>

DEC merupakan lembaga pemilihan kawasan yang berada dibawah pengaturan CEC. Kinerja dari DEC ini dipengaruhi oleh kurangnya waktu, adakalanya sumber daya, dan pendanaan. Lebih penting lagi, pergantian secara terus menerus anggota-anggota DEC ini mempengaruhi stabilitas, efisiensi, dan kinerja umum dari DECs itu sendiri.<sup>22</sup> Sedangkan PEC merupakan lembaga yang dibentuk oleh DEC berdasarkan pada pencalonan yang diberikan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan, sebagaimana kandidat-kandidat yang mayoritas. Pembentukan PEC secara umum dinilai bagus dan sebagian besar sejalan dengan prosedur, meskipun beberapa penyimpangan telah dicatat, seperti penyerahan dokumen pencalonan dikumpulkan selama pemilu sebelumnya, tanda tangan palsu atau salinan ID tanpa persetujuan calon itu sendiri. Penggantian anggota-anggota ini dimulai setelah PEC dibentuk dan berlanjut sampai pada hari pemilihan, dan

<sup>20</sup> OSCE/ODIHR. 2014. Observation of Early Presidential Election in Ukraine, 25 Mei 2014. Dapat dilihat dalam <http://www.osce.org/node/116545> diakses 4 Februari 2015

<sup>21</sup> OSCE/ODIHR. Ukraine: Early Parliamentary Elections 26 Oktober 2014 dalam *OSCE/ODIHR EOM Final Report*. hal. 9

<sup>22</sup> *Ibid*

hal ini mempengaruhi kinerja DEC's dan PEC's.

Pada saat pemilu berlangsung, para peninjau dari IEOM melaporkan bahwa keadaan dari 249 tempat pemungutan suara berjalan dengan baik, tapi hanya 7 dari 249 tempat yang dilaporkan mengalami sedikit masalah prosedural dan keterlambatan pembukaan pemilihan. Pemungutan suara yang dilaporkan para peninjau sebanyak 3.175 laporan berjalan baik, tanpa adanya perbedaan kawasan atau perbedaan desa-kota. Peninjau dari IEOM menilai 10 % dari 340 penghitungan suara yang mereka amati berjalan kurang baik. Masalah yang terjadi adalah kesalahan dalam prosedur penghitungan suara, dan sekitar 20 % dari PEC's yang diamati memiliki masalah dalam menyelesaikan hasil protokol.<sup>23</sup>

Proses pengolahan suara juga dinilai kurang baik oleh para peninjau IEOM yang mengamati 60 dari 171 tempat DEC's. Mereka mencatat permasalahan pengaturan organisasi yang menyebabkan ketegangan dan kerusuhan, keterlibatan pihak-pihak yang tidak berhubungan dalam proses ini, serta masalah kualitas dari protokol PEC's itu sendiri. Sebagian besar dari tempat-tempat DEC's ini tidak terlibat dalam pengamatan hasil data yang masuk, dan sebagai akibatnya adalah hasil penghitungan dari kawasan-kawasan ini akan diperbarui oleh situs CEC. Hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat keabsahan dan transparansi data yang diolah oleh DEC's. Kinerja DEC's terhambat karena 2 hal, yaitu karena kegagalan mereka dalam melaksanakan tugasnya, dan karena gangguan dari

pihak-pihak bersenjata,<sup>24</sup> seperti di kawasan timur.

### **OSCE Menjadi Mediator antara Rusia dan Ukraina**

Perselisihan antara pemerintahan baru Ukraina dengan Federasi Rusia adalah karena intervensi Rusia di Krimea dan aneksasi Krimea oleh Rusia. Walaupun aneksasi Krimea ini dianggap sah oleh Rusia karena pemerintahan lokal Krimea yang telah menyelenggarakan referendum dan sebagian besar penduduknya ingin berganung dengan Federasi Rusia. Pemerintahan baru Ukraina dan negara-negara Eropa mengatakan bahwa referendum tersebut tidak sah dan aneksasi Rusia tersebut tidak sah. Dalam mencari solusi dan kesepakatan antara kedua negara ini, OSCE menjadi mediator dalam upaya perbincangan untuk mencari jalan terbaik dari permasalahan ini.

Pertemuan antara perwakilan dari Rusia dan Ukraina untuk OSCE PA (*Parliamentary Assembly*) bertemu di Vienna untuk memenuhi undangan dari Presiden Ranko Krivokapic yang juga anggota dari OSCE PA. Pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral yang mengikutsertakan anggota dari OSCE PA yang lain. Pertemuan ini membahas dan penilaian kedua negara tentang masalah-masalah vital yang terjadi dalam krisis dan setuju untuk melanjutkan pembicaraan ketahap selanjutnya demi menciptakan stabilitas keamanan di Ukraina.<sup>25</sup> Pertemuan selanjutnya akan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 26

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal. 27-28

<sup>25</sup> OSCE PA. Russian and Ukrainian Delegation to OSCE PA Meet to Discuss Crisis. Dapat dilihat dalam <http://www.oscepa.org/news-media/press-releases/1668-russian-and-ukrainian->

diadakan di Baku, Azerbaijan dalam pembicaraan Sidang Tahunan OSCE PA ke-23.

Ukraina dan Rusia dalam pertemuan di Baku saling berbagi pandangan dalam perkembangan terbaru kondisi di Ukraina dan akan melanjutkan untuk membuka dialog yang akan dilakukan dalam “dua jalur”. Jalur pertama adalah tetap melanjutkan dialog bilateral antara kedua perwakilan dari dua negara ini, dan jalur kedua adalah menciptakan kelompok hubungan parlementer internasional yang terdiri dari perwakilan Ukraina dan Rusia yang diperkenalkan oleh perwakilan Federasi Rusia Sergey Naryshkin dalam amandemen untuk resolusi Komisi Urusan Politik dan Keamanan OSCE PA. Amandemen ini berbunyi “dalam menciptakan kreasi, pada kinerja OSCE PA dari kelompok hubungan parlementer di Ukraina untuk mengurangi ketegangan dan mendukung negara ini keluar dari krisis.”<sup>26</sup> Jalur dua jalan ini merupakan awal baik dalam mencari kesepahaman antara Ukraina dan Rusia.

Pertemuan selanjutnya semakin menampakan kesungguhan dari OSCE untuk membantu Ukraina keluar dari krisis ini. Rusia sebagai negara yang juga ikut terlibat mendukung usaha OSCE ini. Pada tanggal 26 Agustus 2014, OSCE, Ukraina, dan Rusia duduk dalam satu forum di Minsk, Belarus, dalam

membahas proses meredakan krisis di Ukraina. Pertemuan pada 26 Agustus ini adalah pertemuan tatap muka antara Presiden Poroshenko dan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini memiliki tujuan yang jelas, dimana Ukraina menginginkan gencatan senjata dan penarikan militer Rusia dari Ukraina timur. Pertemuan tiga arah ini kemudian disebut dengan *Trilateral Contact Group*, yang pada akhirnya tanggal 5 September di tahun yang sama ditandatangani Protokol Minsk sebagai bentuk keseriusan ketiga aktor ini dalam membantu menyelesaikan krisis Ukraina. Protokol tersebut juga dihadiri dan ditandatangani oleh mantan presiden Ukraina, Leonid Kuchma, dan pimpinan separatis Donets’k dan Luhans’k, yakni A.V. Zakharchenko dan I.V. Plotnitskiy. Ada 12 poin dalam Protokol Minsk ini, diantara lain:

1. Pastikan penghentian penggunaan senjata secara langsung
2. Pastikan pemantauan dan verifikasi oleh OSCE dalam penggunaan non-senjata
3. Mengimplementasikan desentralisasi kekuasaan, termasuk dengan cara memberlakukan Hukum Ukraina "Sehubungan dengan status sementara pemerintah daerah di daerah-daerah tertentu dari Donets’k dan wilayah Luhans’k" (UU Keistimewaan)
4. Pastikan pemantauan tetap di perbatasan negara Ukraina-Rusia dan diverifikasi oleh OSCE, seiringan dengan menciptakan keamanan di wilayah perbatasan Ukraina dan Federasi Rusia
5. Segera bebaskan semua sandera dan orang yang ditahan secara tidak sah
6. Periksa orang-orang yang dijatuhi hukum oleh pengadilan dalam

---

delegations-to-osce-parliamentary-assembly-meet-to-discuss-crisis diakses 3 Februari 2015

<sup>26</sup> OSCE PA. Russian and Ukrainian OSCE PA Delegation Pledge to Pursue Two-Track Dialogue. Dapat dilihat dalam <http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1847-russian-and-ukrainian-osce-pa-delegations-pledge-to-pursue-two-track-dialogue> diakses 3 Februari 2015

- perkara-perkara yang terjadi di daerah Luhans'k dan Donets'k
7. Melakukan dialog nasional yang inklusif
  8. Mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Donbass
  9. Pastikan penyelenggaraan pemilu lokal sesuai dengan Hukum Ukraina "Sehubungan dengan status sementara pemerintah daerah di daerah-daerah tertentu dari Donets'k dan wilayah Luhans'k" (UU Keistimewaan)
  10. Penarikan terhadap senjata-senjata ilegal dari kelompok bersenjata, perangkat keras militer, serta militan dan tentara bayaran dari wilayah Ukraina
  11. Mengadopsi sebuah program untuk kebangkitan ekonomi Donbass dan pemulihan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut
  12. Memberikan jaminan keamanan pribadi untuk para peserta konsultasi.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan protokol ini dilapangan, OSCE harus bisa memastikan dan mengawasi bahwa protokol ini dijalankan oleh semua pihak dalam menciptakan kondisi yang stabil di Ukraina timur. Ukraina, Rusia, dan kelompok separatist harus bisa mematuhi dan menjalankan serta memastikan bahwa isi-isi yang terkandung dalam protokol ini dilaksanakan dengan baik.

## Simpulan

Dilihat dari penjelasan yang ada dan berdasarkan data-data yang didapat, dapat kita lihat bahwa OSCE berperan

dengan sangat baik dan termasuk cepat tanggap dalam menangani krisis Ukraina ini. Ukraina setelah merdeka dan sampai sekarang memang masih berada dalam pengaruh kuat dari Rusia. Walaupun Perang Dingin telah berakhir, namun negara Ukraina masih terjebak dalam perekonomian yang buruk.

Krisis dan permasalahan yang dihadapi Ukraina ini cukup kompleks dan rumit. Pemerintahan negara ini dihadapkan pada perbedaan masyarakat yang ada dan jika sedikit saja salah dalam mengambil keputusan akan mudah terjadi hal-hal seperti protes atau demonstrasi dan kerusakan atau bahkan tindak kriminal. Disaat Ukraina sedang menghadapi masalah sosial dan politik dalam negerinya, negara tetangga seperti Rusia yang juga mempunyai kepentingan di Ukraina tentu akan juga mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan itu. Federasi Rusia untuk melindungi masyarakat etnik Rusia yang ada di Ukraina melakukan intervensi militer ke Ukraina timur (Krimia). Dalam keadaan seperti inilah diperlukannya tindakan yang baik dari OSCE dalam membantu menangani permasalahan yang dihadapi Ukraina ini.

OSCE telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam membantu Ukraina keluar dari permasalahan ini. OSCE mencoba mengembangkan nilai-nilai demokrasi dengan melakukan pengawasan terhadap pemilihan presiden dan parlemen di Ukraina dan memberikan pelatihan-pelatihan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi agar bisa menciptakan pemilihan yang transparan dan adil baik secara sistem maupun teknis dalam pelaksanaannya. OSCE juga mengawasi masyarakat

---

<sup>27</sup> Protocol of The Tripartite Liaison Group (original dalam bahasa Ukraina). Protokol ditandatangani 5 September 2014 di Minsk.

minoritas yang ada di Ukraina dengan mencatat dan melaporkan peristiwa spesifik tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap masyarakat minoritas ini.

Upaya-upaya yang dilakukan OSCE termasuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara pemerintahan Ukraina yang baru dengan Federasi Rusia dengan membuka dialog, melakukan pembicaraan, mengikat dua negara ini dengan perjanjian dan kesepakatan, serta mengawasi perbatasan kedua negara ini. Perjanjian-perjanjian ini adalah sesuatu yang mengikat dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Jurnal**

Allison, Roy. 2014. *Russian 'Deniable' Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke The Rule*. Dalam *Jurnal International Affairs Vol. 90 No. 6, 2014*

Halling, Steffen & Stewart, Susan. 2014. *Ukraine in Crisis: Challenge of Developing a New Political Culture*. Dalam *German Institute for International and Security Affairs*

Kapitonenko, Mykola. 2014. *Ukraine: The Political Crisis*, Dalam *Europe Policy Paper 3 : Regional Repercussions of The Ukraine Crisis*

Perrin de Brichambaut, Marc. OSCE & The Crisis in Ukraine. Dalam *Japan Institute of International Affairs, Tokyo 21 Mei 2014*

Smith, Ben & Harari, Daniel. 2014. *Ukraine, Crimea, Russia*. Research Paper : House of Common Library

##### **Dokumen Resmi**

Protocol of The Tripartite Liaison Group (original dalam bahasa Ukraina). Protokol ditandatangani 5 September 2014 di Minsk

##### **Buku**

Smith, A.D.. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Oxford University Press

Trenin, Dmitri. 2014. *The Ukraine Crisis and The Resumption of Great-Power Rivalry*. Moscow: Carnegie Moscow Center

##### **Internet**

Bbc News. 2014. *Ukraine's Sharp Divisions*. Dapat dilihat dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-26387353> diakses 14 Desember 2014

OSCE. Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2 October 2014

OSCE/ODIHR. 2014. *Observation of Early Presidential Election in Ukraine*, 25 Mei 2014. Dapat dilihat dalam <http://www.osce.org/node/116545> diakses 4 Februari 2015

OSCE/ODIHR. *Ukraine: Early Parliamentary Elections 26 Oktober 2014 dalam OSCE/ODIHR EOM Final Report*

OSCE PA. Russian and Ukrainian Delegation to OSCE PA Meet to Discuss Crisis. Dapat dilihat dalam <http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1668-russian-and-ukrainian-delegations-to-osce-parliamentary-assembly-meet-to-discuss-crisis> diakses 3 Februari 2015

OSCE PA. Russian and Ukrainian OSCE PA Delegation Pledge to Pursue Two-Track Dialogue. Dapat dilihat dalam <http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1847-russian-and-ukrainian-osce-pa-delegations-pledge-to-pursue-two-track-dialogue> diakses 3 Februari 2015

The Economist. *Ukraine and Rusia: Why is Ukraine's Economy in Such a Mess ?*. 2014. Dapat dilihat dalam <http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/03/ukraine-and-russia> diakses 22 November 2014

“The Failed States Index 2013,” dapat dilihat dalam <http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable> diakses 22 November 2014

“The World Bank GDP Growth Annual,” dapat dilihat dalam <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG> diakses 22 November 2014